JURNAL
KEBIJAKAN PUBLIK
ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 4, 2026

KINERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA DALAM MITIGASI BENCANA BANJIR DI KECAMATAN AMUNTAI TENGAH

Febry Valentino[1], Djayeng Turano Gunade [2], Akhmad Berkatillah[3]
Program Studi Administrasi Publik
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai
e-mail: fbry1515@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurang optimalnya capaian jumlah layanan BPBD, belum terukurnya target program mitigasi prabencana secara valid, lambatnya respons terhadap keluhan masyarakat terdampak banjir, serta belum adanya SOP resmi sebagai pedoman kegiatan. Penelitian ini bertujuan mengetahui Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam Mitigasi Bencana Banjir di Kecamatan Amuntai Tengah beserta faktor-faktor penghambatnya. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teori kinerja model Dwiyanto. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam terhadap 9 informan yang dipilih secara *purposive sampling*, dan dokumentasi. Analisis data menerapkan Model Miles & Huberman, sedangkan uji kredibilitas menggunakan perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, bahan referensi, dan *member check*. Hasil penelitian menunjukkan kinerja BPBD dalam mitigasi banjir berjalan cukup baik. Sub variabel yang berkategori cukup baik adalah kualitas layanan, responsivitas, dan akuntabilitas, sedangkan produktivitas dan responsibilitas berjalan kurang baik. Faktor pendukungnya meliputi instruksi kerja sama dari Bupati dan Wakil Bupati, Kecamatan Amuntai Tengah, serta SKPD terkait, ditambah kerja sama tim yang kuat. Faktor penghambatnya terdiri atas belum adanya SOP yang jelas, kekurangan SDM, dan kurangnya fasilitas pendukung. Saran ditujukan kepada Kepala Pelaksana BPBD, Pegawai BPBD, Pemerintah Kabupaten HSU, masyarakat setempat, dan peneliti selanjutnya.

Kata Kunci:. Kinerja, BPBD, Mitigasi Bencana Banjir

ABSTRACT

This research was motivated by the suboptimal achievement of BPBD service outputs, the lack of valid measurement of mitigation program targets in the pre-disaster phase, the slow response to complaints from communities affected by floods, and the absence of official Standard Operating Procedures (SOPs) to guide activities. This study aims to examine the performance of the Regional Disaster Management Agency (BPBD) of Hulu Sungai Utara Regency in flood disaster mitigation in Amuntai Tengah District and to identify the factors that hinder its performance. This research employed a descriptive qualitative *approach based on Dwiyanto's performance model. Data were collected through observation, in-depth interviews with nine informants selected using purposive sampling, and documentation. Data were analyzed using the Miles and Huberman Model, while data credibility was assessed through prolonged observation, increased persistence, triangulation, reference materials, and member checking. The results showed that BPBD's performance in flood mitigation was fairly good. The sub-variables categorized as fairly good were service quality, responsiveness, and accountability, while productivity and responsibility were categorized as poor. Supporting factors included cooperation initiated by the Regent and Vice Regent, Amuntai Tengah District, and relevant Regional Government Organizations (SKPD), as well as strong teamwork. The inhibiting factors included the absence of clear SOPs, insufficient human resources, and inadequate supporting facilities. Recommendations are addressed to the Head of BPBD, BPBD employees, the Hulu Sungai Utara Regency Government, the local community, and future researchers.*

Keywords*: Performance, BPBD, Flood Disaster Mitigation*

ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 4, 2026

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki tingkat kerawanan bencana yang tinggi, terutama bencana hidrometeorologi seperti banjir. Kondisi ini dipengaruhi oleh letak geografis Indonesia yang berada di wilayah tropis dengan curah hujan tinggi sepanjang tahun. Intensitas hujan yang besar meningkatkan risiko genangan dan luapan sungai di berbagai wilayah. Selain itu, variasi musim yang tidak menentu menyebabkan pola curah hujan sulit diprediksi secara akurat. Perubahan iklim global turut memperkuat anomali cuaca yang berdampak pada peningkatan kejadian banjir. Hal ini menunjukkan bahwa faktor alam dan iklim memiliki peran kuat dalam membentuk kerentanan bencana di Indonesia. Banjir menjadi salah satu jenis bencana yang paling sering terjadi di Indonesia dan memiliki dampak luas terhadap kehidupan masyarakat. Dampak tersebut tidak hanya terbatas pada kerugian material seperti kerusakan rumah dan infrastruktur. Banjir juga mengganggu aktivitas sosial masyarakat karena mobilitas menjadi terhambat. Dari sisi ekonomi, masyarakat mengalami penurunan pendapatan akibat terganggunya kegiatan usaha. Selain itu, kondisi kesehatan masyarakat ikut terdampak melalui meningkatnya risiko penyakit berbasis lingkungan. Oleh karena itu, banjir menjadi perhatian utama dalam kebijakan penanggulangan bencana di tingkat nasional maupun daerah. Selain faktor alam, kejadian banjir juga dipengaruhi oleh aktivitas manusia yang tidak terkendali. Perubahan tata guna lahan menjadi salah satu penyebab utama meningkatnya risiko banjir. Alih fungsi hutan menjadi permukiman atau lahan pertanian mengurangi daya serap air tanah. Pembangunan yang tidak memperhatikan aspek lingkungan mempercepat aliran permukaan air. Kurangnya sistem drainase yang memadai juga memperparah kondisi genangan di wilayah tertentu. Kondisi ini memperkuat potensi banjir terutama di daerah yang secara geografis sudah rentan.

Kecamatan Amuntai Tengah merupakan salah satu wilayah yang paling terdampak banjir di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Wilayah ini memiliki kondisi topografi yang relatif datar sehingga aliran air menjadi lambat. Sistem drainase yang terbatas memperparah kondisi genangan saat curah hujan meningkat. Air yang masuk ke wilayah ini sulit dialirkan kembali ke sungai atau saluran utama. Akibatnya, genangan dapat bertahan dalam waktu yang cukup lama. Kondisi ini menjadikan Amuntai Tengah sebagai wilayah dengan tingkat kerentanan yang tinggi terhadap banjir. Beberapa desa di Kecamatan Amuntai Tengah, mengalami banjir secara rutin setiap tahun. Kejadian ini menunjukkan bahwa banjir bukan lagi peristiwa insidental tetapi sudah menjadi pola tahunan. Intensitas genangan yang terjadi juga cenderung berulang dengan karakteristik yang sama. Hal ini memperlihatkan adanya masalah struktural dalam pengelolaan lingkungan dan air. Kerentanan wilayah tersebut semakin meningkat karena tidak ada perubahan signifikan dalam penanganannya. Kondisi ini menegaskan bahwa wilayah tersebut memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap bencana banjir.

Banjir yang terjadi secara berulang di wilayah ini menimbulkan dampak yang signifikan bagi masyarakat. Dari aspek sosial, banjir menyebabkan terganggunya aktivitas sehari-hari masyarakat. Kegiatan pendidikan sering terhenti karena akses menuju sekolah terendam air. Aktivitas kerja masyarakat juga ikut terganggu akibat mobilitas yang terbatas. Interaksi sosial masyarakat menjadi terhambat karena kondisi lingkungan yang tidak mendukung. Hal ini menunjukkan bahwa banjir berdampak langsung terhadap stabilitas sosial masyarakat. Dari aspek ekonomi, banjir menyebabkan kerugian yang cukup besar bagi masyarakat terdampak. Rumah warga mengalami kerusakan akibat terendam air dalam waktu lama. Lahan pertanian tidak dapat digunakan sehingga hasil produksi menurun. Infrastruktur publik seperti jalan dan fasilitas umum juga mengalami kerusakan. Kondisi ini menyebabkan biaya pemulihan yang cukup tinggi bagi masyarakat dan pemerintah. Dampak tersebut secara langsung menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat di wilayah terdampak.

Sementara itu, dari aspek lingkungan, banjir dapat menyebabkan penurunan kualitas lingkungan yang cukup signifikan. Genangan air yang berlangsung lama memicu terjadinya kerusakan ekosistem di wilayah terdampak. Limbah rumah tangga yang terbawa arus air mencemari lingkungan sekitar permukiman. Kondisi ini menyebabkan penurunan kualitas air yang digunakan oleh masyarakat. Selain itu, genangan yang kotor dapat menimbulkan bau tidak sedap dan menjadi sumber penyakit. Hal ini menunjukkan bahwa banjir tidak hanya berdampak secara sosial dan ekonomi, tetapi juga merusak lingkungan. Dalam upaya penanggulangan bencana, Badan

ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 4, 2026

Penanggulangan Bencana Daerah memiliki peran strategis di tingkat daerah. Lembaga ini bertanggung jawab dalam mengelola risiko bencana secara terencana dan terarah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menjalankan fungsi mulai dari tahap pencegahan hingga pemulihan pascabencana. Setiap tahapan membutuhkan koordinasi yang baik antar pihak terkait. Peran ini menuntut adanya kinerja organisasi yang efektif dan responsif. Oleh karena itu, BPBD menjadi aktor utama dalam penanganan bencana di daerah.

Mitigasi bencana merupakan salah satu aspek penting dalam penanggulangan bencana yang bertujuan mengurangi risiko dan dampak. Upaya mitigasi dilakukan sebelum bencana terjadi sebagai langkah preventif. Perencanaan yang matang menjadi dasar dalam menentukan strategi mitigasi yang tepat. Edukasi kepada masyarakat juga diperlukan untuk meningkatkan kesadaran terhadap risiko bencana. Selain itu, pembangunan infrastruktur yang mendukung menjadi bagian penting dalam mengurangi dampak banjir. Hal ini menunjukkan bahwa mitigasi memerlukan pendekatan yang terintegrasi. Namun demikian, pelaksanaan mitigasi bencana banjir di Kabupaten Hulu Sungai Utara masih menghadapi berbagai tantangan. Program mitigasi yang telah disusun belum sepenuhnya mampu mengurangi kejadian banjir. Banjir masih terjadi secara rutin setiap tahun di beberapa wilayah. Kecamatan Amuntai Tengah menjadi salah satu daerah yang terus terdampak. Hal ini menunjukkan adanya kendala dalam implementasi kebijakan di lapangan. Kondisi ini menandakan bahwa upaya mitigasi belum berjalan secara maksimal. Adapun Fenomena yang peneliti temui yakni:

1. Capaian jumlah layanan BPBD Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam program mitigasi prabencana belum optimal. Hal ini terlihat dari terbatasnya kegiatan mitigasi yang teridentifikasi di lapangan, yang umumnya masih berupa sosialisasi kepada masyarakat. Selain itu, belum tersedia data yang komprehensif mengenai jenis, rincian, dan sebaran kegiatan sehingga capaian kinerja belum dapat diketahui secara jelas. Kondisi ini menunjukkan masih adanya kesenjangan antara tugas BPBD dalam penyelenggaraan mitigasi prabencana dengan pelaksanaannya di lapangan.
2. Pencapaian target program mitigasi banjir belum dapat diukur secara optimal karena belum tersedia data yang valid, lengkap, dan terukur mengenai tingkat keberhasilan program. Meskipun kegiatan telah dilaksanakan sesuai program, belum terdapat pengukuran yang jelas terhadap capaian target. Keterbatasan personel dan sarana pendukung juga memengaruhi pencapaian tujuan program.
3. Respons BPBD dalam memberikan pelayanan saat banjir masih belum optimal. Dalam beberapa kondisi, penanganan baru dilakukan ketika genangan air sudah tinggi sehingga upaya mitigasi belum mampu mengurangi dampak bencana secara maksimal sejak awal. Keterbatasan SDM, sarana pendukung, dan luasnya wilayah penanganan turut memengaruhi kecepatan pelayanan.
4. Tindak lanjut terhadap laporan dan keluhan masyarakat masih memerlukan waktu karena harus melalui proses pendataan, verifikasi, dan koordinasi dengan instansi terkait. Akibatnya, penanganan maupun bantuan sering kali belum dapat diberikan secara cepat sehingga kebutuhan masyarakat terdampak belum terpenuhi tepat waktu.
5. Pelaksanaan mitigasi banjir di BPBD Kabupaten Hulu Sungai Utara belum didukung oleh Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi secara resmi. Kegiatan masih mengacu pada arahan pimpinan, pengalaman kerja, dan koordinasi antarbidang karena SOP masih dalam tahap penyusunan. Kondisi ini menunjukkan belum adanya pedoman operasional yang baku dalam pelaksanaan mitigasi banjir.

Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah dari Widuri, Sartima, dan Bachtiar, (2024) dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Ekasakti Padang Provinsi Sumatera Barat dengan judul "Kinerja BPBD dalam Mitigasi Banjir di Kota Padang." yang menunjukkan adanya perkembangan ada positif, walaupun masi ada sejumlah tantangan. Serta adanya penelitian dari Panjaitan, (2023) dengan judul *"*Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Mitigasi Bencana Banjir di Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat" dari Program Studi Manajemen Keamanan Dan Kesalamatan Publik. Menunjukkan masih kurang optimalnya kinerja BPBD di Kabupaten Bandung. Dan diperkuat dengan hasil penelitian Dakka, Sattu, dan Kalagison, (2020) yang berjudul "Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam

Kesiapsiagaan Penanggulangan Banjir Di Kota Sorong" Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Muhammadiyah Sorong. Yang membahas penyebab terjadinya banjir di Kota Sorong disebabkan adanya galian yang dilakukan oleh masyarakat maupun perusahaan penambangan galian pasir, sebab gunung digusur dan diambil matrialnya kemudian disangrae diambil hasil matrial kecialnya untuk keperluan pembangunan. Menunjukkan bahwa kinerja BPBD di Kota Sorong sudah berjalan optimal namun terdapat beberapa kendala.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan teori kinerja model Dwiyanto (dalam Hasbani Pasolong, (2017 : 206-208) yang mengatakan bahwa proses kinerja terdiri dari 5 (lima) komponen, yakni:. Produktivitas; Kualitas Layanan; Responsivitas; Responsibilitas; Akuntabilitas dan faktor-faktor lingkungan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi (Sugiyono, 2022) Sumber data diambil melalui teknik *Purposive Sampling* dengan jumlah informan sebanyak 9 orang (Sugiyono, 2022). Teknik analisis data yang digunakan menggunakan Model Miles & Huberman meliputi reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data atau penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2022). Uji kredibilitas data pada penelitian ini meliputi perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, menggunakan bahan referensi, dan *member check* (Sugiyono, 2022).

PEMBAHASAN

A. Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Dalam Mitigasi Bencana Banjir di Kecamatan Amuntai Tengah

Didalam mendukung kinerja maka sudah saatnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara melakukan perubahan terhadap pelayanan dan peningkatan tugas-tugas untuk mendukung kinerja. reformasi pembaharuan terhadap pimpinan dan pegawai harus memiliki legimitasi yang sesuai dengan standarisasi dan perundang-undangan yang berlaku didalam mendukung akuntabilitas dan stabilitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang baik dan good governance. Untuk lebih jelasnya mengenai hasil dari penelitian ini dapat dilihat pada penjelasan berikut:

1. Produktivitas
   a) Jumlah Layanan Yang dihasilkan

      Analisis Data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, mengarah pada kesimpulan bahwa indikator jumlah layanan yang dihasilkan dalam mitigasi bencana banjir oleh BPBD Kabupaten Hulu Sungai Utara di Kecamatan Amuntai Tengah berada pada kategori kurang baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya masyarakat yang kurang mengetahui layanan mitigasi dari bpbd, serta tidak adanya data yang valid, lengkap, dan terstruktur.

   b) Pencapaian Target Program

      Analisis data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, mengarah pada kesimpulan bahwa indikator Pencapaian Target Program yang dihasilkan dalam mitigasi bencana banjir oleh BPBD Kabupaten Hulu Sungai Utara di Kecamatan Amuntai Tengah berada pada kategori kurang baik. Hal ini dapat dibuktikan adanya masyarakat yang tidak mengetahui bagaimana pencapaian target program mitigasi banjir, serta peneliti ketiadaan data yang yang menyebabkan tidak adanya bukti secara jelas dan objektif.

ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 4, 2026

2. Kualitas Layanan
   a) Kepuasan Masyarakat

      Analisis Data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, mengarah pada kesimpulan bahwa indikator kepuasan masyarakat dalam mitigasi bencana banjir oleh BPBD Kabupaten Hulu Sungai Utara di Kecamatan Amuntai Tengah berada pada kategori cukup baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya penerimaan dan respon positif masyarakat terhadap kegiatan sosialisasi, pelatihan kebencanaan, program Destana, serta bantuan yang diberikan saat terjadi banjir.

   b) Kecepatan dan kemudahan pelayanan

      Analisis Data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, mengarah pada kesimpulan bahwa indikator Kecepatan dan kemudahan pelayanan dalam mitigasi bencana banjir oleh BPBD Kabupaten Hulu Sungai Utara di Kecamatan Amuntai Tengah berada pada kategori cukup baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya adanya upaya BPBD untuk memberikan pelayanan secara cepat melalui koordinasi, pemantauan lapangan, sosialisasi, serta penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak banjir. Selain itu, pelayanan yang diberikan juga relatif mudah diakses oleh masyarakat melalui berbagai kegiatan dan saluran informasi yang tersedia.

3. Responsivitas
   a) Kesesuaian layanan dengan kebutuhan masyarakat

      Analisis Data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, mengarah pada kesimpulan bahwa indikator Kesesuaian layanan dengan kebutuhan masyarakat dalam mitigasi bencana banjir oleh BPBD Kabupaten Hulu Sungai Utara di Kecamatan Amuntai Tengah berada pada kategori cukup baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya upaya BPBD untuk melakukan pendataan terlebih dahulu terhadap masyarakat dan wilayah terdampak sebelum menentukan bentuk pelayanan maupun bantuan yang akan diberikan. Dengan adanya proses pendataan tersebut, bantuan yang disalurkan umumnya telah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di lapangan, terutama kebutuhan pokok seperti sembako.

   b) Kecepatan menanggapi keluhan

      Analisis Data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, mengarah pada kesimpulan bahwa indikator Kecepatan menanggapi keluhan dalam mitigasi bencana banjir oleh BPBD Kabupaten Hulu Sungai Utara di Kecamatan Amuntai Tengah berada pada kategori kurang baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan BPBD menerima dan menindaklanjuti keluhan yang disampaikan masyarakat, beberapa informan menyatakan bahwa respon yang diberikan masih tergolong lambat, terutama dalam menindaklanjuti laporan dan keluhan masyarakat saat banjir terjadi. Masyarakat mengakui bahwa keluhan yang disampaikan umumnya mendapat tanggapan dari BPBD, namun proses tindak lanjut di lapangan sering kali membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga belum sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat.

4. Responsibilitas
   a) Kepatuhan terhadap SOP

      Analisis Data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, mengarah pada kesimpulan bahwa indikator Kepatuhan terhadap SOP dalam mitigasi bencana banjir oleh BPBD Kabupaten Hulu Sungai Utara di Kecamatan Amuntai Tengah berada pada kategori kurang baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan pelaksanaan kegiatan mitigasi telah

dilakukan melalui koordinasi dan pembagian tugas yang terstruktur, namun hasil observasi menunjukkan bahwa SOP yang menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan belum tersedia secara jelas karena masih dalam tahap penyusunan. Hal ini menyebabkan pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya memiliki standar operasional tertulis yang baku sebagai acuan dalam menjalankan tugas.

b) Kesesuaian dengan Kebijakan

Analisis Data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, mengarah pada kesimpulan bahwa indikator Kesesuaian dengan Kebijakan dalam mitigasi bencana banjir oleh BPBD Kabupaten Hulu Sungai Utara di Kecamatan Amuntai Tengah berada pada kategori cukup baik. Hal ini dapat dibuktikan bahwa pelaksanaan kegiatan mitigasi telah mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 2 Tahun 2022, tugas pokok dan fungsi BPBD, serta arahan dari pemerintah daerah dan instansi terkait. Kegiatan mitigasi seperti sosialisasi kebencanaan, pemantauan daerah rawan banjir, pelatihan relawan, dan penyaluran bantuan tetap dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi BPBD. Namun dalam pelaksanaannya, peneliti belum menemukan bukti dokumen SOP mitigasi banjir yang jelas dan terdokumentasi secara lengkap karena SOP masih dalam tahap penyusunan oleh pihak BPBD.

5. Akuntabilitas

a) Keterbukaan Informasi

Analisis Data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, mengarah pada kesimpulan bahwa indikator Keterbukaan Informasi dalam mitigasi bencana banjir oleh BPBD Kabupaten Hulu Sungai Utara di Kecamatan Amuntai Tengah berada pada kategori baik. Hal ini dapat dibuktikan dari upaya BPBD dalam menyampaikan informasi kebencanaan kepada masyarakat melalui berbagai media, seperti sosialisasi langsung, media sosial, baliho, leaflet, videotron, serta koordinasi dengan pemerintah desa dan kecamatan. Informasi yang diberikan meliputi potensi banjir, himbauan kesiapsiagaan, wilayah rawan bencana, serta langkah-langkah yang harus dilakukan masyarakat ketika menghadapi banjir.

b) Pertanggungjawaban kepada Masyarakat

Analisis Data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, mengarah pada kesimpulan bahwa indikator Pertanggungjawaban kepada Masyarakat dalam mitigasi bencana banjir oleh BPBD Kabupaten Hulu Sungai Utara di Kecamatan Amuntai Tengah berada pada kategori cukup baik. Hal ini dapat dibuktikan dari berbagai upaya yang dilakukan BPBD, seperti penyampaian informasi kebencanaan, pemantauan dan pendataan wilayah terdampak, koordinasi dengan pihak terkait, peninjauan langsung ke lapangan, serta pemberian bantuan kepada masyarakat terdampak banjir.

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi dalam Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Dalam Mitigasi Bencana Banjir di Kecamatan Amuntai Tengah

Faktor faktor yang mendukung maupun menghambat pelaksanaan dalam Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Dalam Mitigasi Bencana Banjir di Kecamatan Amuntai Tengah antara lain:

ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 4, 2026

1. Faktor Pendukung
   a) Adanya instruksi untuk saling bekerja sama dengan Bupati dan Wakil Bupati, Kecamatan Amuntai Tengah, serta SKPD terkait menjadi salah satu faktor pendukung dalam pelaksanaan mitigasi banjir. diketahui bahwa BPBD Kabupaten Hulu Sungai Utara menjalin koordinasi dengan berbagai pihak melalui rapat, kegiatan lapangan, serta pembahasan mengenai permasalahan banjir, penentuan prioritas penanganan, dan bantuan kepada masyarakat terdampak. Hasil observasi menunjukkan adanya koordinasi antara BPBD, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan SKPD terkait dalam peninjauan lokasi, pendataan wilayah terdampak, serta pelaksanaan kegiatan mitigasi. Hasil dokumentasi juga memperlihatkan adanya rapat koordinasi, peninjauan lapangan, dan kegiatan mitigasi yang melibatkan berbagai instansi. Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa kerja sama tersebut mendukung kelancaran pelaksanaan mitigasi banjir di Kecamatan Amuntai Tengah melalui koordinasi, peninjauan lapangan, pendataan wilayah terdampak, dan pemberian bantuan kepada masyarakat sehingga upaya pengurangan risiko bencana dapat berjalan lebih efektif.
   b) Kerja sama tim yang kuat, diketahui bahwa kerja sama tim yang kuat menjadi salah satu faktor pendukung kinerja BPBD Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam mitigasi banjir. Meskipun jumlah personel terbatas, para pegawai tetap menunjukkan semangat kerja yang tinggi, saling membantu, serta melakukan koordinasi dan pembagian tugas sebelum turun ke lapangan sehingga kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif. Hubungan kerja yang baik antara pegawai BPBD dan Tim Reaksi Cepat (TRC) juga mempermudah pelaksanaan kegiatan mitigasi di lapangan. Peneliti melihat adanya kerja sama yang baik antarpegawai dalam pelaksanaan kegiatan mitigasi banjir. Setiap anggota tim menjalankan tugasnya masing-masing dan saling berkoordinasi sehingga kegiatan di lapangan dapat berjalan dengan lancar dan tepat waktu. Hasil dokumentasi juga menunjukkan keterlibatan pegawai BPBD dan tim terkait dalam pelaksanaan mitigasi banjir melalui koordinasi, pembagian tugas, dan kerja sama selama kegiatan berlangsung. Dapat disimpulkan bahwa kerja sama tim yang kuat menjadi faktor pendukung dalam kinerja BPBD Kabupaten Hulu Sungai Utara pada kegiatan mitigasi banjir di Kecamatan Amuntai Tengah. Meskipun jumlah personel terbatas, koordinasi yang baik, pembagian tugas yang jelas, serta semangat kerja yang tinggi mampu mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan sehingga dapat diselesaikan secara efektif, tepat waktu, dan sesuai dengan SOP yang berlaku.
2. Faktor Penghambat

   Faktor yang menghambat kinerja merupakan kondisi yang dapat mengurangi efektivitas pelaksanaan mitigasi banjir sehingga tujuan yang telah ditetapkan belum dapat dicapai secara optimal.

   a) Tidak Adanya Ketersediaan Standar Operasional Prosedur (SOP) Yang Dirumuskan Secara Jelas, dapat diketahui bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) khusus mengenai mitigasi bencana banjir di BPBD Kabupaten Hulu Sungai Utara belum tersedia secara final dan masih dalam tahap penyusunan. Kepala Pelaksana BPBD menjelaskan bahwa informasi mengenai SOP dapat diperoleh melalui bidang yang menangani kegiatan mitigasi, yaitu Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan. Sementara itu, Staf Pencegahan dan

Kesiapsiagaan menyampaikan bahwa penyusunan SOP masih belum selesai karena adanya berbagai subkegiatan lain yang menjadi prioritas pelaksanaan.

b) Kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM), Jumlah personel BPBD yang masih terbatas menyebabkan beban kerja pegawai menjadi lebih besar karena harus menangani penyusunan program, perencanaan, koordinasi, hingga pelaksanaan kegiatan di lapangan. Kondisi tersebut mengharuskan pegawai saling membantu serta memperoleh dukungan dari bidang lain dan Tim Reaksi Cepat (TRC) agar kegiatan mitigasi tetap dapat dilaksanakan secara efektif. Analisis data hasil wawancara dan observasi mengarah pada kesimpulan bahwa kekurangan sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor yang menghambat kinerja BPBD Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam pelaksanaan mitigasi banjir di Kecamatan Amuntai Tengah.

c) Kurangnya Fasilitas Pendukung, Keterbatasan fasilitas pendukung masih menjadi kendala dalam pelaksanaan mitigasi banjir. Beberapa sarana, prasarana, dan peralatan yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan di lapangan belum tersedia secara memadai sehingga memengaruhi efektivitas pelaksanaan kegiatan. Meskipun demikian, BPBD tetap berupaya memanfaatkan fasilitas yang tersedia serta melakukan koordinasi dengan bidang lain agar kegiatan mitigasi tetap berjalan. Analisis data hasil wawancara dan observasi mengarah pada kesimpulan bahwa kurangnya fasilitas pendukung merupakan faktor yang menghambat kinerja BPBD Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam pelaksanaan mitigasi banjir di Kecamatan Amuntai Tengah.

SIMPULAN

Dengan merujuk pada hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Hulu Sungai Utara Dalam Mitigasi Bencana Banjir Di Kecamatan Amuntai Tengah berjalan dengan cukup baik. Dengan menggunakan teori kinerja dari Dwiyanto dalam Hasbani Pasolong (2017 : 206-208) untuk mengukur proses kinerja organisasi ini peneliti menemukan bahwa: *Pertama*, sub-variabel Produktivitas dengan kurang baik dikarenakan: (1) indikator Jumlah layanan yang dihasilkan dari bpbd kurang baik; dan (2) indikator pencapaian target program kurang baik. *Kedua*, sub-variabel kualitas layanan berjalan dengan cukup baik dikarenakan: (1) indikator kepuasan masyarakat cukup baik; dan (2) indikator kecepatan dan kemudahan pelayanan kurang baik baik. *Ketiga*, sub-variabel responsivitas dengan cukup baik dikarenakan: (1) indikator Kesesuaian layanan dengan kebutuhan masyarakat cukup baik; dan (2) indikator kecepatan menanggapi keluhan kurang baik. *Keempat*, sub-variabel responsibilitas berjalan dengan kurang baik dikarenakan: (1) indikator kepatuhan terhadap sop kurang baik; dan (2) indikator kesesuaian dengan kebijakan kurang baik. *Kelima,* sub-variabel akuntabilitas berjalan dengan cukup baik dikarenakan: (1) indikator keterbukaan informasi cukup baik; dan (2) indikator pertanggungjawaban kepada masyarakat cukup baik. Faktor pendukung dalam Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Hulu Sungai Utara Dalam Mitigasi Bencana Banjir Di Kecamatan Amuntai Tengah adalah Adanya instruksi untuk saling bekerja sama dengan Bupati dan wakil bupati, Kecamatan Amuntai Tengah, Serta SKPD yang terkait mitigasi banjir, dan kerja sama tim yang kuat, Faktor-faktor penghambat dalam Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Hulu Sungai Utara Dalam Mitigasi Bencana Banjir Di Kecamatan Amuntai Tengah adalah: (1) Tidak tersedia SOP yang Jelas, (2) Kurangnya SDM dan (3) Kurangnya Fasilitas.

Saran dalam penelitian ini ditunjukan: (1) Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Hulu Sungai

Utara diharapkan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Hulu Sungai Utara diharapkan dapat meningkatkan fungsi pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program mitigasi bencana banjir. Selain itu, BPBD perlu segera merumuskan, menetapkan, dan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) secara menyeluruh, khususnya SOP mitigasi bencana banjir, sebagai pedoman resmi dalam pelaksanaan tugas setiap bidang. Penyusunan SOP tersebut perlu menjadi prioritas mengingat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 2 Tahun 2022 Pasal 4 ayat (1) telah ditegaskan bahwa BPBD mempunyai tugas menyusun dan menetapkan prosedur penanganan bencana. (2) Pegawai BPBD Kabupaten Hulu Sungai Utara diharapkan meningkatkan produktivitas program mitigasi melalui penyusunan sistem pendataan dan pelaporan yang lebih akurat, lengkap, dan terukur sehingga capaian program dapat dievaluasi secara objektif. BPBD juga perlu meningkatkan kecepatan respons terhadap laporan masyarakat dengan memperkuat sistem komunikasi, koordinasi lapangan, serta memanfaatkan teknologi informasi untuk penyampaian informasi kebencanaan. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, dan simulasi kebencanaan perlu dilakukan secara berkelanjutan agar kualitas pelayanan kepada masyarakat semakin optimal. (3) Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara diharapkan memberikan dukungan yang lebih besar terhadap pelaksanaan mitigasi bencana melalui peningkatan alokasi anggaran, penambahan jumlah personel sesuai kebutuhan, serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung mitigasi banjir. Dukungan tersebut diperlukan agar BPBD dapat melaksanakan tugas mitigasi secara lebih efektif dan mampu menjangkau seluruh wilayah yang memiliki tingkat kerawanan banjir tinggi. (4) Masyarakat Kecamatan Amuntai Tengah diharapkan berperan aktif dalam mendukung upaya mitigasi bencana banjir dengan mengikuti kegiatan sosialisasi, pelatihan, dan simulasi yang diselenggarakan BPBD. Selain itu, masyarakat perlu meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan, seperti menjaga kebersihan saluran air, tidak membuang sampah sembarangan, serta segera melaporkan potensi maupun kejadian banjir kepada BPBD agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat. (5) Peneliti Selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian mengenai mitigasi bencana banjir dengan menggunakan pendekatan atau teori kinerja organisasi yang berbeda, memperluas lokasi penelitian pada wilayah lain yang memiliki karakteristik berbeda, serta mengkaji aspek kolaborasi antarinstansi, partisipasi masyarakat, atau efektivitas kebijakan mitigasi bencana sehingga dapat memberikan perspektif yang lebih komprehensif terhadap peningkatan kinerja BPBD.

DAFTAR PUSTAKA

Dakka, Sattu, dan Kalagison (2020) *Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Kesipsiagaan Penanggulangan Banjir DI Kota Sorong*. Universitas Muhammadiyah Sorong, Indonesia. Tersedia pada: https://www.academia.edu/81055451/Kinerja_Badan_Penanggulangan_Bencana_Daerah_Dalam_Kesipsiagaan_Penanggulangan_Banjir_DI_Kota_Sorong (Diakses: 9 April 2026).

Panjaitan, D. (2023) *Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Mitigasi Bencana Banjir Di Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat*. PhD Thesis. IPDN. Tersedia pada: http://eprints.ipdn.ac.id/15927/ (Diakses: 7 April 2026).

Pasolong Hasbani (2017) *Teori Administrasi Publik | PDF | Karier & Perkembangan*. Tersedia pada: https://id.scribd.com/document/596579214/teori-administrasi-publik (Diakses: 8 April 2026).

Perda Kabupaten Hulu Sungai (2022) *PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH*.

ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 4, 2026

Sugiyono, S. (2022) *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.

Widuri,Sartima,Bachtiar, W. (2024) "Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang Dalam Mitigasi Penanggulangan Bencana Banjir," *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(3), hlm. 41543–41548.